

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA DIKECAMATAN
SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG**

Dwi Putri Helviran Ningrum¹, Rahmadani Yusran², Rika Sabri³

^{1,2}Universitas Negeri Padang, ³Universitas Andalas

Email: dwiputrihelviraningrum7@gmail.com¹, dwiputrihelviraningrum7@gmail.com²,

yusrandy@fis.unp.ac.id³, rikasabri@nrs.unand.ac.id⁴

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the elderly family resilience policy in Sijunjung District, Sijunjung Regency, using the Van Meter and Van Horn (1975) policy implementation model as an analytical framework. The policy is part of a national strategy to address population aging through a family- and community-based approach, operationalized through the Elderly Family Development (BKL) program. This research adopts a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that policy implementation faces challenges across nearly all variables: lack of clarity in implementers' understanding of policy standards, limited resources, weak implementer capacity and cross-sectoral coordination, and a disposition among implementers that does not fully reflect an understanding of the policy's essence. Furthermore, the local social, economic, and political context shapes different patterns of implementation across nagari. The study also finds that the effectiveness of the family-based intervention approach remains substantively limited. While program activities are running, they have not fully resulted in behavioral changes or improved family capacity in elderly care. This article contributes to the study of social policy implementation by highlighting the importance of active family involvement, strengthening the institutional capacity of implementers, and the need for policy adaptation to local social contexts to ensure that elderly family resilience programs are implemented effectively and sustainably.*

Keywords: *Policy Implementation, Elderly Family Resilience, Elderly Family Development, Social Policy, Family-Based Interventions.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ketahanan keluarga lansia di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, dengan menggunakan model Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai kerangka analisis. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menghadapi penuaan penduduk melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, yang dioperasionalkan melalui program Bina Keluarga Lansia (BKL). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan menghadapi permasalahan pada hampir semua variabel implementasi: belum jelasnya pemahaman pelaksana terhadap standar kebijakan, keterbatasan sumber daya, lemahnya kapasitas pelaksana dan koordinasi lintas sektor, serta disposisi pelaksana yang belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman terhadap esensi kebijakan. Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, dan politik lokal turut membentuk pola implementasi yang berbeda di tiap nagari. Temuan juga menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan intervensi berbasis keluarga masih belum optimal secara substantif. Kegiatan program berjalan, namun belum sepenuhnya menciptakan perubahan perilaku dan peningkatan

kapasitas keluarga dalam merawat lansia. Artikel ini memberikan kontribusi pada studi implementasi kebijakan sosial dengan menekankan pentingnya pelibatan keluarga secara aktif, penguatan kapasitas kelembagaan pelaksana, serta perlunya adaptasi kebijakan terhadap konteks sosial lokal agar kebijakan ketahanan keluarga lansia dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketahanan Keluarga Lansia, Bina Keluarga Lansia, Kebijakan Sosial, Intervensi Berbasis Keluarga.

PENDAHULUAN

Indonesia tengah memasuki fase transisi demografi dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia). Diperkirakan pada tahun 2045, satu dari lima warga negara akan berusia 60 tahun ke atas (Sari Seftiani, 2020). Situasi ini menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya menjamin kesejahteraan lansia secara medis dan ekonomi, tetapi juga memperkuat sistem pendukung utama mereka: keluarga. Ketahanan keluarga menjadi fondasi penting untuk memastikan lansia dapat tetap hidup layak, bermakna, dan sehat secara fisik maupun psiko-sosial di usia senja.

Secara kebijakan, pemerintah telah menginisiasi berbagai langkah strategis, di antaranya melalui Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan Peraturan BKKBN No. 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan Bina Keluarga Lansia (BKL). Kebijakan ini mengedepankan pendekatan keluarga sebagai aktor utama dalam perawatan lansia di rumah dan komunitas. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya terinternalisasi dan terimplementasi dengan baik di tingkat lokal. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan program BKL kerap menghadapi permasalahan seperti lemahnya kapasitas kader, rendahnya partisipasi keluarga, dan belum terbangunnya sinergi lintas sektor secara optimal (Tamara et al., 2022; Ta'ala et al., 2021; Erwanto et al., 2020).

Konsep ketahanan keluarga lansia merujuk pada kemampuan keluarga dalam memenuhi,

mengelola, dan mempertahankan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial lansia dalam kondisi perubahan dan keterbatasan. Sunarti (2015) menjelaskan bahwa ketahanan keluarga menjadi indikator penting dalam kebijakan pembangunan sosial karena lansia merupakan kelompok usia yang rentan terhadap eksklusi sosial, disabilitas, dan ketergantungan ekonomi. Dalam perspektif kebijakan publik, pendekatan ketahanan keluarga menempatkan keluarga bukan sekadar objek pelayanan, tetapi sebagai subjek pelindung dan penguat fungsi kesejahteraan lansia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep ketahanan keluarga menjadi krusial untuk melihat sejauh mana kebijakan mampu memberdayakan keluarga dalam konteks perawatan lansia berbasis rumah tangga dan komunitas.

Kabupaten Sijunjung sebagai wilayah studi memiliki karakteristik sosial dan geografis yang unik. Terbagi atas nagari-nagari dengan akses pelayanan publik yang berbeda-beda, pelaksanaan program perlindungan lansia sering kali tidak berjalan merata. Meskipun terdapat komitmen daerah untuk mendukung program BKL, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran keluarga, serta budaya perawatan tradisional yang mulai melemah menjadi permasalahan tersendiri. Berdasarkan data BPS (2024), lebih dari 5,78% penduduk berada dalam kategori miskin, dengan distribusi lansia yang tersebar di wilayah-wilayah terpencil. Situasi ini memberikan konteks penting bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berbenturan dengan persoalan administratif, tetapi juga

dengan kondisi sosial ekonomi dan geografis yang kompleks. Oleh karena itu, studi ini berupaya membongkar dinamika tersebut secara mendalam dalam kerangka kebijakan publik yang sensitif terhadap konteks lokal.

Kesenjangan antara kebijakan dan praktik juga terjadi di Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Sijunjung. Meski pemerintah daerah telah menginisiasi edukasi keluarga, posyandu lansia, dan kunjungan rumah melalui program BKL, masih banyak nagari yang belum optimal dalam pelaksanaannya. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan variasi kualitas antar wilayah, serta belum adanya sistem evaluasi yang konsisten untuk mengukur ketercapaian tujuan program. Studi-studi sebelumnya juga cenderung menyoroti aspek outcome (hasil) dari program lansia, dan belum banyak yang membedah proses implementasi kebijakan secara mendalam berdasarkan aktor, dinamika kelembagaan, dan kondisi sosial administratif di tingkat lokal (Sabri, 2018; Sabri et al., 2021; Yusran & Sabri, 2020).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ketahanan keluarga lansia di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, dengan fokus pada praktik pelaksanaan program, hambatan dan faktor pendukung, serta evaluasi efektivitas intervensi kebijakan berbasis keluarga yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kader lapangan. Untuk memahami kompleksitas proses pelaksanaan kebijakan tersebut, artikel ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini dipilih karena mampu

menjelaskan secara sistematis bagaimana kebijakan publik diterjemahkan dari dokumen normatif ke dalam tindakan nyata di lapangan melalui interaksi berbagai aktor dan faktor kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan ketahanan keluarga lansia di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali realitas empiris yang kompleks dan kontekstual, khususnya terkait dinamika antaraktor, permasalahan lapangan, serta keberfungsian kebijakan dalam konteks sosial administratif lokal.

Informan penelitian dipilih secara purposif, yaitu mereka yang dianggap memiliki keterlibatan langsung maupun pengetahuan relevan terhadap pelaksanaan program Bina Keluarga Lansia (BKL). Informan utama meliputi kader BKL, petugas dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Sijunjung, aparat nagari, dan anggota keluarga lansia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan dokumentasi program (manual kegiatan, laporan BKL, panduan kader, dsb). Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara naturalistik dalam konteks sosial yang sebenarnya.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen guna memperoleh pemahaman yang utuh dan kredibel.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Seluruh temuan dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang memfokuskan pada enam variabel kunci: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis bagaimana kebijakan ketahanan keluarga lansia diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di tingkat nagari serta bagaimana berbagai faktor mempengaruhi proses implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan ketahanan keluarga lansia diimplementasikan di Kecamatan Sijunjung melalui sejumlah program yang terintegrasi dalam kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL), Posyandu Lansia, penyuluhan kesehatan, serta kunjungan rumah oleh kader. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa pelaksanaan program ini telah berlangsung di sebagian besar nagari, namun menghadapi beragam permasalahan yang memengaruhi efektivitas implementasinya.

Untuk menganalisis proses implementasi tersebut secara sistematis, digunakan model Van Meter dan Van Horn (1975), yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh enam variabel kunci: (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) komunikasi antarorganisasi, (5) disposisi pelaksana, serta (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menelaah bagaimana kebijakan diterjemahkan dari dokumen normatif ke dalam praktik di tingkat lokal, serta bagaimana aktor-aktor pelaksana dan kondisi lingkungan memengaruhi jalannya kebijakan.

Pembahasan berikut akan diuraikan berdasarkan keenam variabel tersebut secara bertahap untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan ketahanan keluarga lansia di Kecamatan Sijunjung.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), *standar dan sasaran kebijakan* merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan suatu implementasi. Standar kebijakan merujuk pada kejelasan perumusan kebijakan, tujuan yang hendak dicapai, serta konsistensinya dalam diinternalisasi oleh pelaksana di berbagai tingkatan. Semakin konkret, realistis, dan terukur suatu tujuan, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi (Agustino, 2020).

Dalam konteks kebijakan ketahanan keluarga lansia di Kecamatan Sijunjung, standar normatif telah ditetapkan secara nasional melalui Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, dan diperkuat secara teknis oleh Peraturan BKKBN No. 13 Tahun 2019 tentang Bina Keluarga Lansia (BKL). Tujuan utama kebijakan ini adalah mewujudkan lansia yang mandiri, sehat, dan bermartabat melalui penguatan peran keluarga sebagai unit perawatan utama.

Namun dalam praktik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap standar dan tujuan kebijakan belum sepenuhnya merata di tingkat pelaksana lokal. Program BKL cenderung diartikan secara administratif sebagai kewajiban laporan kegiatan rutin bulanan, bukan sebagai strategi yang berorientasi pada perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas keluarga. Hal ini senada dengan temuan Ta'ala et al. (2021) yang mencatat bahwa kegiatan BKL sering kali kehilangan makna substantif karena

miskinnya pemaknaan tujuan program oleh pelaksana di lapangan.

Lebih lanjut, belum tersedia indikator lokal yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Misalnya, tidak terdapat instrumen untuk mengevaluasi peningkatan kompetensi keluarga dalam merawat lansia, perubahan kualitas interaksi sosial lansia dalam rumah tangga, atau keberlanjutan dukungan emosional dari anak kepada orang tua lansia. Padahal, menurut Wahab (2005), ukuran keberhasilan kebijakan harus disusun secara kontekstual agar mampu menjadi *rambu operasional* dalam implementasi di tingkat lokal.

Ketiadaan tujuan yang terukur di tingkat kecamatan dan nagari menyebabkan pelaksana lebih mengutamakan aspek formalitas seperti jumlah kehadiran dan pengisian daftar hadir, dibandingkan esensi kegiatan itu sendiri. Akibatnya, standar dan tujuan kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat mengalami reduksi makna dalam proses implementasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses internalisasi standar dan tujuan kebijakan belum berlangsung secara optimal di tingkat pelaksana. Dalam kerangka Van Meter dan Van Horn, ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan dengan praktik lapangan berpotensi menurunkan kualitas implementasi secara keseluruhan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketiadaan perangkat teknis yang menjabarkan tujuan nasional menjadi standar operasional lokal, atau karena lemahnya proses komunikasi dan pelatihan kebijakan di tingkat bawah. Tanpa kejelasan tentang apa yang ingin dicapai, siapa yang bertanggung jawab mencapainya, dan bagaimana cara mengukurnya, para pelaksana cenderung menjalankan program berdasarkan persepsi masing-masing.

Dengan demikian, pemahaman terhadap standar dan tujuan kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu ditelaah lebih dalam dalam konteks pelaksanaan di lapangan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana aktor pelaksana memahami dan menginternalisasi sasaran strategis tersebut ke dalam kegiatan konkret dan terukur. Di Kecamatan Sijunjung, temuan ini menjadi indikator awal bahwa pemaknaan kebijakan masih berada pada level prosedural, belum menyentuh esensi transformasi sosial yang menjadi ruh dari kebijakan ketahanan keluarga lansia.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel kunci dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang mencakup tidak hanya dana, tetapi juga sumber daya manusia, waktu, peralatan, serta informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Ketersediaan dan distribusi sumber daya yang memadai menjadi prasyarat utama agar standar dan tujuan kebijakan dapat dioperasionalkan di tingkat lapangan (Wahab, 2005; Kadji, 2015).

Dalam konteks implementasi kebijakan ketahanan keluarga lansia di Kecamatan Sijunjung, temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bina Keluarga Lansia (BKL) masih menghadapi sejumlah keterbatasan sumber daya. Salah satu kendala utama adalah minimnya jumlah dan kapasitas kader BKL di beberapa nagari, terutama di wilayah terpencil seperti Nagari Silokek. Kader yang ada sering kali merangkap tugas sebagai kader posyandu balita atau kegiatan sosial lainnya, sehingga waktu dan perhatian mereka terbagi.

Selain itu, keterbatasan pelatihan dan penguatan kapasitas kader menjadi persoalan penting. Beberapa kader mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan teknis terkait perawatan lansia, gizi lansia, atau komunikasi efektif dengan keluarga lansia. Akibatnya, materi penyuluhan yang diberikan seringkali bersifat umum, tidak kontekstual, dan kurang menjangkau aspek psikososial lansia yang justru krusial dalam program ketahanan keluarga. Padahal, menurut Indonesia Family Life Survey, pelatihan kader secara berkala terbukti berdampak terhadap kualitas program berbasis keluarga (Sunarti, 2015).

Dari sisi sarana dan prasarana, kegiatan seperti posyandu lansia dan penyuluhan keluarga masih banyak dilakukan di balai nagari atau rumah warga yang tidak selalu memadai untuk kegiatan interaktif. Alat ukur kesehatan seperti tensimeter digital, timbangan, dan alat cek gula darah hanya tersedia di beberapa titik, dan tidak jarang harus bergantian pakai antar nagari. Di sisi lain, materi penyuluhan yang digunakan juga sangat terbatas dan monoton, sering kali berupa fotokopi panduan umum dari BKKBN pusat tanpa adaptasi lokal atau media visual yang menarik.

Keterbatasan sumber daya ini secara langsung mempengaruhi cakupan dan kualitas pelaksanaan program. Misalnya, kegiatan kunjungan rumah oleh kader hanya bisa dilakukan secara insidental karena keterbatasan waktu dan biaya operasional. Begitu pula dengan senam lansia atau forum keluarga lansia, yang meskipun dijadwalkan rutin, sering tertunda karena logistik dan pendanaan yang tidak tersedia secara kontinyu dari nagari atau dinas terkait.

Temuan ini sejalan dengan kajian sebelumnya oleh Mayasari et al. (2021), yang menunjukkan bahwa implementasi program BKL di berbagai daerah kerap terhambat oleh

faktor teknis seperti minimnya alat pendukung, kurangnya intensitas supervisi, serta belum optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam hal logistik program. Artinya, persoalan sumber daya bukan hanya soal keterbatasan, melainkan juga berkaitan dengan keberlanjutan pendanaan, kualitas dukungan teknis, dan sistem alokasi yang belum merata antarwilayah.

Lebih jauh, realitas ini mengonfirmasi pentingnya memahami sumber daya sebagai bagian dari dimensi politik dan kelembagaan kebijakan. Seperti dikemukakan Grindle (1980), sumber daya adalah instrumen sekaligus refleksi dari keberpihakan institusi terhadap prioritas sosial tertentu. Dalam konteks ini, alokasi sumber daya yang minim terhadap program ketahanan keluarga lansia bisa dibaca sebagai indikasi lemahnya posisi isu lansia dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara teoritik, hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat lokal sangat rentan ketika infrastruktur pendukung tidak dipenuhi. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa *good policy design without sufficient resources will likely fail in execution*, karena pelaksana tidak memiliki alat dan dukungan yang cukup untuk menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata (Van Horn & Van Meter, 1975; Agustino, 2020). Oleh karena itu, sumber daya bukan hanya syarat teknis, tetapi sekaligus cermin komitmen dan kapasitas institusional dalam menggerakkan kebijakan publik.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), karakteristik agen pelaksana merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses implementasi kebijakan. Faktor ini mencakup struktur organisasi, orientasi nilai, kapasitas personal, serta wewenang yang dimiliki oleh pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Ketika

agen pelaksana memiliki struktur yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta pemahaman terhadap isi dan tujuan kebijakan, maka kebijakan lebih berpeluang untuk diimplementasikan secara efektif (Wahab, 2005; Taufiqurakhman, 2014).

Dalam konteks kebijakan ketahanan keluarga lansia di Kecamatan Sijunjung, agen pelaksana terdiri dari berbagai pihak, termasuk kader Bina Keluarga Lansia (BKL), petugas DP3AP2KB, aparat nagari, dan tokoh masyarakat. Hasil temuan lapangan menunjukkan adanya disparitas kapasitas antar pelaksana. Sebagian kader menunjukkan dedikasi dan kepedulian tinggi dalam menjalankan perannya, bahkan dengan keterbatasan sarana. Namun sebagian lainnya masih menjalankan tugas sebatas memenuhi kewajiban administratif tanpa pemahaman menyeluruh terhadap tujuan kebijakan.

Sebagian besar kader BKL tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan atau kesejahteraan sosial, dan belum pernah mengikuti pelatihan substantif tentang isu kelanjutusiaan, komunikasi keluarga, atau pemenuhan hak-hak lansia. Akibatnya, pelaksanaan program cenderung berfokus pada kegiatan teknis rutin seperti pencatatan kehadiran dan pembagian makanan tambahan, tanpa pendekatan berbasis kebutuhan atau kondisi spesifik keluarga lansia. Hal ini diperburuk oleh kurangnya supervisi dan pembinaan berkala dari dinas terkait.

Ketidajelasan struktur koordinasi antar pelaksana juga menjadi masalah. Tidak semua pelaksana memahami batas dan ruang lingkup tugas masing-masing. Misalnya, dalam beberapa kasus, kader BKL harus menjalankan tugas lintas sektor seperti mendampingi lansia untuk pelayanan kesehatan atau bantuan sosial, tanpa adanya kejelasan tentang dukungan operasional atau koordinasi lintas dinas. Ini mengakibatkan

munculnya ketegangan struktural dan kelelahan di tingkat pelaksana lapangan.

Temuan ini memperkuat argumen Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh "disposisi dan kapasitas birokrasi tingkat bawah". Ketika pelaksana tidak diposisikan sebagai subjek perubahan sosial, melainkan hanya sebagai perpanjangan tangan administratif, maka kebijakan berisiko kehilangan efektivitas transformatifnya.

Secara umum, karakteristik agen pelaksana dalam konteks Kecamatan Sijunjung menunjukkan adanya kombinasi antara dedikasi personal dan kelemahan struktural. Kader dan aparat nagari memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat sasaran, namun tidak selalu memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan yang memadai untuk mengelola program secara strategis dan berkelanjutan. Ini menunjukkan pentingnya memperkuat posisi pelaksana sebagai aktor kunci dalam keberhasilan kebijakan melalui pelatihan, pembinaan, dan skema dukungan lintas sektor yang lebih jelas.

4. Komunikasi Antarorganisasi

Dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), komunikasi antarorganisasi merujuk pada proses penyampaian informasi, instruksi, serta pemaknaan kebijakan dari pembuat kebijakan ke pelaksana di lapangan, termasuk koordinasi horizontal dan vertikal antar aktor. Komunikasi yang efektif diperlukan agar tujuan kebijakan dapat dipahami dengan seragam, dan pelaksana dapat menjalankan program secara terkoordinasi dan responsif terhadap dinamika lokal (Agustino, 2020; Kadji, 2015).

Temuan penelitian di Kecamatan Sijunjung menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan ketahanan keluarga lansia masih bersifat parsial

dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Koordinasi vertikal antara BKKBN provinsi/kabupaten dengan pemerintah nagari lebih bersifat administratif—terbatas pada penyampaian surat, laporan, atau undangan kegiatan. Informasi yang disampaikan lebih banyak berorientasi pada kewajiban pelaporan kegiatan fisik (jumlah pertemuan, jumlah peserta), bukan pada substansi atau capaian perubahan sosial yang diharapkan.

Di sisi lain, komunikasi horizontal antarunit pelaksana di daerah—seperti antara DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan pemerintah nagari—masih berjalan secara sektoral. Masing-masing lembaga menjalankan program dengan agenda dan jadwal masing-masing, sehingga potensi sinergi lintas sektor belum termanfaatkan secara optimal. Misalnya, kegiatan posyandu lansia tidak selalu disinkronkan dengan kegiatan penyuluhan keluarga oleh BKL atau pemberian bantuan sosial untuk lansia. Situasi ini mengakibatkan fragmentasi program, di mana pelaksanaan kebijakan berlangsung secara terpisah-pisah dan tidak saling mendukung.

Dari sisi teknis, belum adanya platform komunikasi terpadu atau forum koordinasi tetap di tingkat kecamatan membuat proses penyamaan persepsi antarpelaksana cenderung tidak konsisten. Kader dan aparat nagari juga tidak selalu mendapatkan pembaruan informasi atau pembinaan langsung dari kabupaten secara berkala. Hal ini menguatkan pandangan Van Horn dan Van Meter bahwa komunikasi yang tidak langsung, tidak jelas, atau tidak berkelanjutan cenderung menciptakan distorsi makna kebijakan (*policy distortion*) di tingkat implementasi (Van Meter & Van Horn, 1975).

Selain itu, saluran komunikasi tidak selalu bersifat dua arah. Informasi dari atas ke bawah (top-down) lebih dominan daripada mekanisme umpan balik (bottom-up) dari kader atau

keluarga sasaran kepada pengambil kebijakan. Padahal, komunikasi timbal balik diperlukan agar kebijakan dapat beradaptasi dengan kondisi lokal, serta untuk membangun rasa memiliki dari para pelaksana di lapangan (Nugroho, 2009).

Temuan ini juga senada dengan pandangan Grindle (1980), yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana komunikasi antaraktor berlangsung secara fungsional dan tidak birokratis. Ketika komunikasi hanya difungsikan sebagai alat penyampaian administratif, bukan sebagai forum pertukaran makna dan penyamaan persepsi, maka implementasi rentan kehilangan arah dan substansi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelemahan komunikasi antarorganisasi tidak hanya memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga membentuk cara pelaksana memahami peran dan tanggung jawab mereka. Akibatnya, banyak pelaksana di lapangan yang bekerja dalam isolasi struktural dan tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang posisi program BKL dalam kerangka kebijakan ketahanan keluarga lansia secara umum.

5. Disposisi Pelaksana

Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana merujuk pada tingkat penerimaan, pemahaman, dan komitmen aktor-aktor pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), bahkan kebijakan yang didukung oleh sumber daya dan struktur kelembagaan yang memadai dapat gagal apabila pelaksana tidak memiliki kemauan atau kepercayaan terhadap kebijakan tersebut. Disposisi pelaksana mencakup tiga elemen utama: pemahaman terhadap kebijakan, tingkat kesepahaman dengan tujuan kebijakan, serta intensitas komitmen pelaksana dalam

melaksanakan program (Wahab, 2005; Taufiqurakhman, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana di tingkat nagari dan kader BKL di Kecamatan Sijunjung telah menunjukkan komitmen yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan program ketahanan keluarga lansia. Hal ini tercermin dari inisiatif beberapa kader dalam melakukan kunjungan rumah meskipun tidak dijadwalkan secara formal, serta usaha mereka membangun komunikasi informal dengan keluarga lansia. Beberapa kader juga mengaku termotivasi karena merasa memiliki tanggung jawab sosial terhadap warga lansia di sekitarnya.

Namun, meskipun komitmen secara personal tergolong kuat, pemahaman substansial terhadap arah dan tujuan kebijakan belum merata. Kader dan pelaksana di tingkat nagari lebih banyak memahami program BKL sebatas sebagai kegiatan penyuluhan, senam lansia, atau pencatatan kegiatan bulanan. Masih minim pemaknaan bahwa program ini adalah bagian dari kerangka kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan ketahanan sosial keluarga lansia secara berkelanjutan. Akibatnya, banyak pelaksana bekerja secara teknis, bukan strategis, dan kurang terlibat dalam evaluasi atau refleksi dampak program.

Situasi ini menunjukkan adanya gap antara loyalitas administratif dan pemahaman konseptual. Beberapa kader menjalankan program dengan patuh, namun tidak selalu memiliki pengetahuan kritis tentang mengapa program itu penting atau bagaimana keberhasilannya seharusnya diukur. Padahal, menurut teori implementasi, pelaksana yang memahami esensi kebijakan secara utuh akan lebih adaptif dalam menghadapi permasalahan teknis dan lebih kreatif dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal (Indiahono, 2009).

Sebagaimana ditekankan oleh Grindle (1980), keberhasilan implementasi tidak hanya memerlukan struktur dan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh "komitmen politik dan perilaku aktor pelaksana". Dalam konteks ini, komitmen pelaksana bukan hanya sekadar loyalitas administratif, melainkan juga refleksi dari sejauh mana mereka merasa menjadi bagian dari perubahan yang dituju oleh kebijakan. Ketika pelaksana tidak melihat kebijakan sebagai sesuatu yang bermakna bagi mereka maupun masyarakat sasaran, maka pelaksanaan program cenderung bersifat mekanistik dan minim inovasi.

Selain itu, adanya kejelasan mandat, penghargaan, dan dukungan dari lingkungan kelembagaan juga turut memengaruhi disposisi. Di beberapa nagari, kader mengeluhkan kurangnya dukungan moral dan pengakuan dari perangkat nagari, sehingga semangat kerja menjadi fluktuatif. Hal ini menguatkan asumsi bahwa disposisi pelaksana tidak hanya ditentukan oleh faktor internal (sikap dan nilai), tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan eksternal dan lingkungan kelembagaan tempat mereka bekerja.

Dengan demikian, dalam konteks Kecamatan Sijunjung, disposisi pelaksana mencerminkan pola yang ambivalen: ada komitmen yang kuat secara personal, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh pemahaman teoritik dan sistem dukungan kelembagaan yang mendorong keberlanjutan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam membangun pelaksana kebijakan yang tidak hanya loyal secara administratif, tetapi juga reflektif, adaptif, dan strategis dalam menjalankan peran mereka.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik menjadi variabel eksternal yang dapat

memperkuat atau justru menghambat jalannya implementasi kebijakan. Lingkungan di mana kebijakan dijalankan menentukan konteks penerimaan masyarakat, kapasitas kelembagaan, hingga dukungan politik terhadap kebijakan tersebut. Dalam banyak kasus, kebijakan yang secara teknis memadai bisa gagal bila tidak sesuai dengan karakter sosial dan struktur ekonomi masyarakat tempat kebijakan tersebut diimplementasikan (Agustino, 2020; Taufiqurakhman, 2014).

Di Kecamatan Sijunjung, kondisi sosial masyarakat memperlihatkan adanya kombinasi antara nilai gotong royong yang masih cukup kuat dengan kecenderungan meningkatnya individualisme, terutama di keluarga muda. Meskipun budaya lokal menempatkan lansia dalam posisi yang dihormati, dalam praktiknya tidak semua keluarga memiliki kesadaran dan kapasitas merawat lansia secara intensif. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang menyerahkan tanggung jawab perawatan sepenuhnya pada kader atau pihak luar, dan tidak aktif mengikuti kegiatan edukasi atau penyuluhan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan sosial seperti migrasi generasi muda, perubahan struktur keluarga, serta tekanan ekonomi turut membentuk dinamika sosial baru yang tidak selalu mendukung program ketahanan keluarga lansia. Sebagaimana dikemukakan Grindle (1980), lingkungan sosial yang berubah dapat menciptakan kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas lapangan, terutama ketika kebijakan tersebut dirancang dengan asumsi nilai-nilai sosial yang belum tentu masih berlaku secara efektif.

Dari sisi ekonomi, tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (5,78% berdasarkan BPS Kabupaten Sijunjung, 2024) berdampak langsung pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar lansia. Keluarga

miskin cenderung fokus pada kebutuhan ekonomi sehari-hari, sehingga aspek-aspek psikososial lansia sering terabaikan. Selain itu, keterbatasan daya beli juga memengaruhi akses terhadap alat bantu kesehatan, nutrisi, serta layanan medis berkualitas, yang menjadi bagian penting dari ketahanan keluarga lansia. Kondisi ini menggambarkan apa yang disebut oleh Lipsky (1980) sebagai "realitas struktural yang mengkondisikan kegagalan mikro", di mana keputusan kebijakan tidak dapat terwujud karena keterbatasan nyata di tingkat rumah tangga.

Secara politik dan administratif, dukungan dari pemerintah daerah terhadap program ketahanan keluarga lansia tergolong cukup baik, ditunjukkan dengan adanya alokasi anggaran dan kegiatan lintas OPD. Namun, dukungan tersebut belum merata dan belum konsisten di semua nagari. Terdapat perbedaan komitmen antar pemerintah nagari, yang berdampak pada kesenjangan kualitas implementasi. Beberapa nagari sangat proaktif dalam mendukung kader dan memfasilitasi kegiatan, sementara yang lain bersikap pasif dan sekadar menjalankan instruksi dari kabupaten.

Dalam kerangka teoritik, kondisi sosial-ekonomi-politik ini mempengaruhi dukungan lingkungan terhadap kebijakan, termasuk persepsi publik, legitimasi pelaksana, dan daya dukung institusi lokal. Ketika kondisi sosial tidak mendukung partisipasi keluarga, ketika ekonomi tidak memungkinkan perawatan mandiri lansia, dan ketika institusi politik lokal tidak kompak, maka kebijakan cenderung terhambat meskipun sudah dirancang dengan baik.

Dengan demikian, implementasi kebijakan ketahanan keluarga lansia di Kecamatan Sijunjung sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi masyarakat dan kesenjangan komitmen antarunit pemerintahan lokal. Pemahaman terhadap konteks ini menjadi

penting untuk menilai mengapa suatu kebijakan bisa berhasil di satu wilayah, namun stagnan atau gagal di wilayah lain dengan karakter sosial-politik yang berbeda.

7. Refleksi atas Efektivitas Intervensi Berbasis Keluarga

Pendekatan intervensi berbasis keluarga merupakan inti dari kebijakan ketahanan keluarga lansia yang dijalankan melalui program BKL. Refleksi atas efektivitas pendekatan ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan benar-benar mampu memperkuat fungsi keluarga sebagai unit utama dalam perawatan dan perlindungan lansia. Berdasarkan temuan di lapangan, efektivitas intervensi kebijakan ini belum merata dan cenderung bersifat prosedural di beberapa nagari. Meskipun terdapat kegiatan rutin seperti posyandu lansia, penyuluhan, dan kunjungan rumah, sebagian besar keluarga masih bersifat pasif, dan kegiatan belum sepenuhnya membentuk perubahan perilaku atau peningkatan kapasitas keluarga dalam merawat lansia secara menyeluruh.

Dalam konteks evaluasi efektivitas, pendekatan ini belum sepenuhnya menyentuh aspek transformatif. Perubahan pengetahuan dan sikap keluarga terhadap perawatan lansia masih terbatas, dan belum tercipta sistem pendampingan yang konsisten dari kader ke keluarga. Artinya, pendekatan ini lebih kuat pada aspek kelembagaan (kegiatan dan struktur) dibanding aspek substantif (perubahan relasi, nilai, dan praktik perawatan). Padahal, pendekatan berbasis keluarga mensyaratkan keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga dalam menjaga kesejahteraan lansia secara emosional, sosial, dan fisik.

Selain itu, dalam beberapa kasus, intervensi kebijakan masih menggantungkan keberhasilan pada motivasi individu kader,

bukan pada sistem dukungan yang terstruktur. Hal ini berimplikasi pada kerentanan program saat kader berganti atau ketika semangat individu tidak lagi tinggi. Di sisi lain, terdapat contoh praktik baik di beberapa nagari yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keluarga dapat berjalan lebih efektif ketika kader dibekali pelatihan mendalam, pemerintah nagari memberikan dukungan anggaran, dan keluarga dilibatkan secara langsung dalam proses edukasi dan pendampingan lansia.

Dengan demikian, efektivitas intervensi berbasis keluarga belum optimal secara menyeluruh, namun menunjukkan potensi yang besar apabila diiringi dengan penguatan strategi pelibatan keluarga, peningkatan kualitas pelatihan kader, serta integrasi lintas sektor di tingkat lokal. Dibutuhkan pula pengembangan indikator keberhasilan yang mengukur perubahan di tingkat keluarga, bukan hanya output kegiatan. Refleksi ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan program, tetapi juga pada proses, nilai, dan dukungan yang menghidupinya di tengah keluarga dan komunitas.

Berdasarkan pembahasan enam variabel dalam model Van Meter dan Van Horn, serta refleksi atas efektivitas pendekatan intervensi berbasis keluarga, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan keluarga lansia di Kecamatan Sijunjung memperlihatkan dinamika yang kompleks dan belum sepenuhnya efektif. Meskipun terdapat dukungan regulasi nasional dan struktur kelembagaan daerah yang mendukung, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan—mulai dari belum jelasnya pemahaman terhadap tujuan kebijakan, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, hingga belum optimalnya disposisi pelaksana dalam menginternalisasi makna strategis kebijakan

tersebut. Di sisi lain, karakter sosial dan ekonomi masyarakat setempat turut memengaruhi daya dorong kebijakan, terutama dalam konteks peran keluarga sebagai agen utama perawatan lansia.

Refleksi tambahan terhadap pendekatan intervensi berbasis keluarga juga menunjukkan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada kualitas pelibatan keluarga, kesiapan kader, serta keberlanjutan dukungan kelembagaan. Pendekatan ini memiliki potensi yang kuat, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai strategi transformatif dalam meningkatkan kesejahteraan lansia secara menyeluruh.

Artikel ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal, khususnya pada sektor ketahanan keluarga lansia yang selama ini belum banyak mendapat perhatian akademik secara mendalam. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada kualitas hidup lansia atau aspek outcome program BKL (Sabri, 2018; Yusran & Sabri, 2020; Ta'ala et al., 2021), artikel ini menempatkan proses implementasi dan refleksi kelembagaan sebagai titik analisis utama. Dengan menggunakan model Van Meter dan Van Horn secara sistematis, artikel ini mampu mengurai aspek struktural, aktor, dan konteks sosial-politik yang memengaruhi efektivitas kebijakan, sekaligus menunjukkan titik-titik kritis yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan kebijakan lansia di tingkat kecamatan. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih utuh terhadap praktik kebijakan, serta membuka ruang diskusi untuk penguatan strategi intervensi berbasis keluarga dalam menghadapi permasalahan penuaan penduduk di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan keluarga lansia di Kecamatan Sijunjung telah dijalankan

melalui berbagai program seperti Bina Keluarga Lansia (BKL), posyandu lansia, penyuluhan kesehatan dan gizi, kunjungan rumah, serta aktivitas fisik. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi permasalahan di hampir seluruh aspek yang dikaji dalam model Van Meter dan Van Horn (1975), serta belum menunjukkan capaian transformatif dalam memperkuat fungsi keluarga sebagai unit perlindungan lansia secara menyeluruh.

Standar dan tujuan kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana di tingkat nagari, sehingga pelaksanaan program seringkali berfokus pada pemenuhan aspek administratif tanpa orientasi terhadap transformasi sosial dalam keluarga. Keterbatasan sumber daya dalam bentuk tenaga kader, kapasitas pelatihan, dan sarana penunjang masih menjadi hambatan utama dalam mendukung pelaksanaan program yang berkualitas dan menjangkau seluruh nagari secara merata. Karakteristik agen pelaksana memperlihatkan adanya komitmen personal yang kuat, namun tidak diiringi dengan dukungan kelembagaan yang sistematis dan struktur koordinasi lintas sektor yang mapan. Komunikasi antarorganisasi juga berjalan secara sektoral dan kurang menyediakan ruang dialog substantif, sementara disposisi pelaksana lebih mencerminkan loyalitas administratif ketimbang pemahaman reflektif terhadap makna strategis kebijakan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat serta variasi dukungan politik di tingkat nagari turut memengaruhi daya dorong kebijakan. Dalam beberapa kasus, intervensi program masih bergantung pada inisiatif kader atau dukungan informal dari pemerintah nagari, tanpa sistem kelembagaan yang menjamin keberlanjutan. Sementara itu, pendekatan intervensi berbasis keluarga yang menjadi inti kebijakan belum menunjukkan efektivitas optimal. Keluarga belum sepenuhnya terlibat aktif dalam

pendampingan lansia, dan keberhasilan program masih bersifat prosedural. Pendekatan ini cenderung kuat di sisi kelembagaan formal, namun lemah dalam menginternalisasi nilai-nilai perawatan lansia sebagai bagian dari dinamika keluarga sehari-hari.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan keluarga lansia tidak dapat hanya bergantung pada perumusan regulasi dan keberadaan program di tingkat pusat, tetapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dipahami, dimaknai, dan dijalankan secara kontekstual oleh aktor pelaksana di tingkat lokal. Penyesuaian kebijakan terhadap realitas sosial, ekonomi, dan budaya setempat menjadi kunci agar program tidak hanya menjadi agenda birokrasi, tetapi betul-betul menjadi instrumen perubahan sosial.

Temuan penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting bagi penguatan pelaksanaan kebijakan ketahanan keluarga lansia di tingkat daerah. Pertama, diperlukan penjabaran tujuan kebijakan ke dalam indikator operasional yang realistis dan kontekstual di tingkat nagari untuk memastikan arah kerja yang seragam dan terukur. Kedua, penguatan kapasitas kader dan pelaksana melalui pelatihan berkelanjutan harus mencakup aspek teknis, substantif, dan etis yang berorientasi pada nilai-nilai perawatan keluarga. Ketiga, dibutuhkan mekanisme koordinasi lintas sektor yang sistemik dan partisipatif, tidak hanya antar instansi teknis, tetapi juga dengan pemerintah nagari dan lembaga sosial lokal. Keempat, pemetaan kerentanan sosial ekonomi keluarga lansia perlu menjadi landasan utama dalam merancang intervensi berbasis bukti yang berkelanjutan. Kelima, penting dikembangkan mekanisme reflektif dan responsif berupa dialog dua arah antara pelaksana kebijakan dan perumus kebijakan, agar proses implementasi

tidak bersifat satu arah dan statis, melainkan terbuka terhadap pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis keluarga secara substansial, kebijakan ketahanan keluarga lansia dapat menjadi instrumen yang tidak hanya menjawab permasalahan penuaan penduduk, tetapi juga memperkuat fondasi sosial masyarakat dalam menjaga martabat dan kesejahteraan lansia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung. (2024). *Statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Sijunjung 2024*.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Mayasari, E., Permanasari, I., & Epina Hayu, R. (2021). Evaluasi tata kelola implementasi program Bina Keluarga Lansia (BKL) pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Mamuju*, 7(1). <http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/m>
- Nugroho, R. (2009). *Public policy (Edisi Kedua)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sabri, R. (2018). Factors influencing the quality of life of the Minang elderly living in

- nursing homes: A perspective of Minang culture. In A. Y. S. Hamid (Ed.), *Proceedings of the 1st Andalas International Nursing Conference (AINiC 2017)* (pp. 1–7). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/ainic-17.2018.1>
- Sabri, R., Yusran, R., & Putra, A. (2021). The experience of the Minang family caring for an older who lives in the core family of children in Padang city. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/6ZNCA>
- Sunarti, E. (2015). *Ketahanan keluarga Indonesia: Dari kebijakan dan penelitian menuju tindakan*. Jakarta: IPB Press.
- Ta'ala, R., Suprastiyo, A., & Musta'ana. (2021). Implementasi program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Bojonegoro. *IAN: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 5(2), 50–58.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan publik: Pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusran, R., & Sabri, R. (2020). Policy to improve the quality of life and welfare of the elderly in nursing homes in West Sumatra Province. In *Proceedings of the International Conference on Public Health*.